**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek KKN serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah mensahkan Undang-undang mengenai otonomi daerah ini. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini diatur dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 dimana UU ini merupakan penyempurnaan dari UU nomor 22 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang sebelumnya yaitu UU nomor 22 tahun 1999.

Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya (Davey, 1988 dan Hirawan, 1991) . Dengan adanya otonomi daerah ini, daerah otonom masih berada dalam pengawasan pemerintah pusat. Agar tugas pemerintahan yang diamanatkan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif dibutuhkan sumber keuangan.

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat harus dikurangi seminimal mungkin.

Metropolitan Bandung Raya pada tahun 2010, terdapat 56 kecamatan yang telah mempunyai ciri perkotaan di Kota Bandung, Kota Cimahi, sebagian Kabupaten Bandung, sebagian Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian Kabupaten Sumedang. 56 kecamatan tersebut termasuk kedalam delineasi Metropolitan Bandung Raya dengan jumlah penduduk sebesar 5.813.269 jiwa dan luas wilayah sebesar 106.015 Ha (konsep awal pembangunan Metropolitan Bandung Raya, 2013).

Dari ke lima kabupaten atau kota yang tergabung dalam Metropolitan Bandung Raya ini Kota Bandung merupakan pusat dari Metropolitan Bandung Raya, jumlah penduduk di Kota Bandung terus meningkat seiring dengan daya tarik di Kota Bandung dan sekitarnya.

Berikut ini jumlah data PAD di Jawa Barat dari tahun 2009-2015:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat Tahun 2009-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | PAD (Rp) |
| 2009 | 5.577.588.779 |
| 2010 | 7.252.242.913 |
| 2011 | 8.502.643.155 |
| 2012 | 9.982.917.415 |
| 2013 | 12.360.109.870 |
| 2014 | 15.038.153.310 |
| 2015 | 15.851.202.864 |

*Sumber:* *Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, BPS*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa PAD di Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tahun 2009 sebesar 5.577.588779 semakin naik di tahun 2015 menjadi 15.581.202.864.

Sementara itu, jumlah hotel yang ada di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 40. Sedangkan, jumlah restoran sendiri yang ada di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 377. Karena letaknya yang strategis, maka beragam jenis pariwisata berkembang di Kota Bandung seperti wisata belanja, wisata kuliner, wisata budaya, wisata alam dan rekreasi. Sepanjang tahun 2016, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencatat 1,7 juta wisatawan domestik dan mancanegara datang ke sejumlah objek wisata, hotel dan restoran di Bandung. Jumlah hitungan kunjungan wisatawan itu mengacu pada asumsi jumlah penjualan tiket semua destinasi wisata, hotel, dan restoran yang ada di Bandung Raya. Sementara itu, objek wisata yang masih menjadi favorit wisatawan, masih didominasi wisata yang berada di wilayah Lembang seperti Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu, Floating Market, Maribaya. Bupati Bandung, Dadang M. Naser menyatakan, pembayaran pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bandung belum dilakukan dengan benar sehingga pemasukannya kecil. Padahal, setiap transaksi di hotel dan restoran sebanyak 10 persennya adalah untuk pembayaran pajak. Berikut ini adalah jumlah hotel dan restoran menurut kecamatan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2016 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat:

**Tabel 1.2**

**Jumlah Hotel dan Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten**

**Bandung Barat Tahun 2010-2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Hotel | Restoran |
| 1 | Rongga | **-** | - |
| 2 | Gununghalu | - | 3 |
| 3 | Sindangkerta | - | 3 |
| 4 | Cililin | - | 32 |
| 5 | Cihampelas | - | 11 |
| 6 | Cipongkor | - | - |
| 7 | Batujajar | - | 23 |
| 8 | Saguling | - | - |
| 9 | Cipatat | - | 19 |
| 10 | Padalarang | 1 | 73 |
| 11 | Ngamprah | - | 51 |
| 12 | Parongpong | 6 | 25 |
| 13 | Lembang | 37 | 117 |
| 14 | Cisarua | - | 8 |
| 15 | Cikalongwetan | - | 9 |
| 16 | Cipendeuy | - | 3 |
| 17 | Jumlah | 44 | 377 |

*Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat*

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah hotel dan restoran menurut kecamatan di Kabupaten Bandung Barat paling banyak terdapat di wilayah Lembang. Hal ini dikarenakan Lembang masih menjadi destinasi wisata favorit yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Alasan utama parawisatawan banyak yang mengunjungi Lembang karena daya tarik alamnya yang masih alami akibat berada di dataran tinggi pegunungan yang masih hijau dan banyaknya objek wisata yang dapat dikunjungi.

Menurut Mardiasmo (2011:11) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah bersumber dari :
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Dana Perimbangan
4. Lain-lain Pendapatan
5. Pembiayaan bersumber dari :
6. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah
7. penerimaan Pinjaman Daerah
8. Dana Cadangan Daerah
9. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan elemen pajak daerah yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila dilihat dari jumlah hotel dan restoran di Bandung Raya yang cukup besar, hal ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor hotel dan restoran. Namun, jika realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran masih dibawah potensi sebenarnya, maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah dianggap tidak berjalan dengan baik.

Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang masih dibawah potensi diakibatkan oleh masih adanya Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang belum tertagih, wajib pajak yang masih menunggak pajak, bahkan penggelapan pajak oleh wajib pajak. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KBB mencatat sejumlah hotel dan restoran di Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih banyak yang melakukan penggelapan pajak.

Hal tersebut diketahui, setelah tim dari DPPKAD KBB melakukan pendataan dan pemeriksaan verifikasi ke beberapa restoran dan hotel yang ada di Kecamatan Lembang. Dikarenakan masih banyaknya Pajak Hotel dan Restoran yang belum dikelola dengan baik, sehingga kontribusi kedua pajak tersebut akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak hanya di Kabupaten Bandung Barat tetapi juga di Kota Bandung, Kab. Bandung, dan Kota Cimahi. Oleh karena itu, sesuai latar belakang di atas peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Efektivitas, Kontribusi, Pertumbuhan Pajak Hotel & Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Bandung Raya Tahun 2008-2018”.**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bandung Raya Tahun 2008-2018 ?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bandung Raya Tahun 2008-2018 ?
3. Bagaimana laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bandung Raya Tahun 2008-2018 ?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bandung Raya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran di Bandung Raya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bandung Raya.

**1.4 Kegunaan Penelitian**

**1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga sebagai tolak ukur atau gambaran pertumbuhan pajak hotel & restoran di Bandung Raya.
2. Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pasundan, khususnya mahasiswa/i jurusan Ekonomi Pembangunan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.

**1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis/empiris berupa :

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Bandung Raya
2. Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Bandung Raya.